

Kebijakan Alokasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar

Amin Rois Sinung Nugroho, S.ST, 8 Oktober 2012



Otonomi Daerah

- ➔ UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
- ➔ UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah
- ➔ Tujuan: Kesejahteraan masyarakat, melalui pendidikan, perekonomian, kesehatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas, Badan atau Kantor Daerah yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, seharusnya berfungsi optimal.

Kenyataannya, sering ditemui bahwa penyaluran anggaran pembangunan daerah melalui SKPD kurang proporsional dengan tugas dan wewenang dinas/instansi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dampak dari kegiatan dinas/instansi menjadi tidak optimal manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan Alokasi Anggaran

- ➔ Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah tidak adanya pedoman baku dalam pengalokasian anggaran.
- ➔ Anggaran yang diterima SKPD di wilayah selama ini cenderung berdasarkan kebiasaan masa lalu sehingga seringkali menimbulkan pertanyaan, apakah komposisi anggaran yang dialokasikan kepada setiap SKPD tersebut merupakan komposisi yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat?
- ➔ Penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan alternatif komposisi pengalokasian anggaran yang optimal untuk SKPD di wilayah pemerintahan Kabupaten Selayar yang rumusannya dilakukan dengan prinsip pemerintahan yang baik dan akuntabel yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Simulasi Kebijakan

Adapun ruang lingkup penelitian yang dilakukan, secara rinci adalah:

- (1) mengklasifikasikan tugas dan wewenang SKPD dibawah Pemerintah Daerah menjadi kegiatan ekonomi, non ekonomi, dan penunjang;
- (2) mengklasifikasi tugas/wewenang SKPD teknis yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi melalui kontribusi sektor yang menjadi wewenangnya dalam meningkatkan kegiatan sektor ekonomi lainnya, kemampuan meningkatkan lapangan pekerjaan dan kemampuan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui analisis *backward* dan *forward* model *input-output* *);
- (3) mengklasifikasi tugas dan wewenang SKPD di bawah Pemda yang aktivitasnya tidak berkaitan dengan kegiatan ekonomi dengan membangun basis *scoring* peran institusinya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya; dan
- (4) memproporsikan SKPD di bawah pemerintah daerah berdasarkan perpaduan penilaian yang proporsional antara peran pengembangan ekonomi dan non ekonomi.

*)United Nations. 1999. *Handbook of Input-Output Table - Compilation and Analysis*. Studies in Methods Series F, No. 74, New York. p. 250

Tabel Input - Output

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

- ➔ PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA (PRODUKSI)
- ➔ PDRB MENURUT PENGELUARAN (KONSUMSI)

BPS KABUPATEN MENERBITKAN PUBLIKASI PDRB MENURUT PENGELUARAN MULAI TAHUN INI

<http://selayarkab.bps.go.id>

Proses Penyusunan APBD

- ➔ Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD
- ➔ Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD
- ➔ Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
- ➔ Penerbitan Surat Edaran
- ➔ Penyusunan Pernyataan Anggaran
- ➔ Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah

Alokasi Anggaran

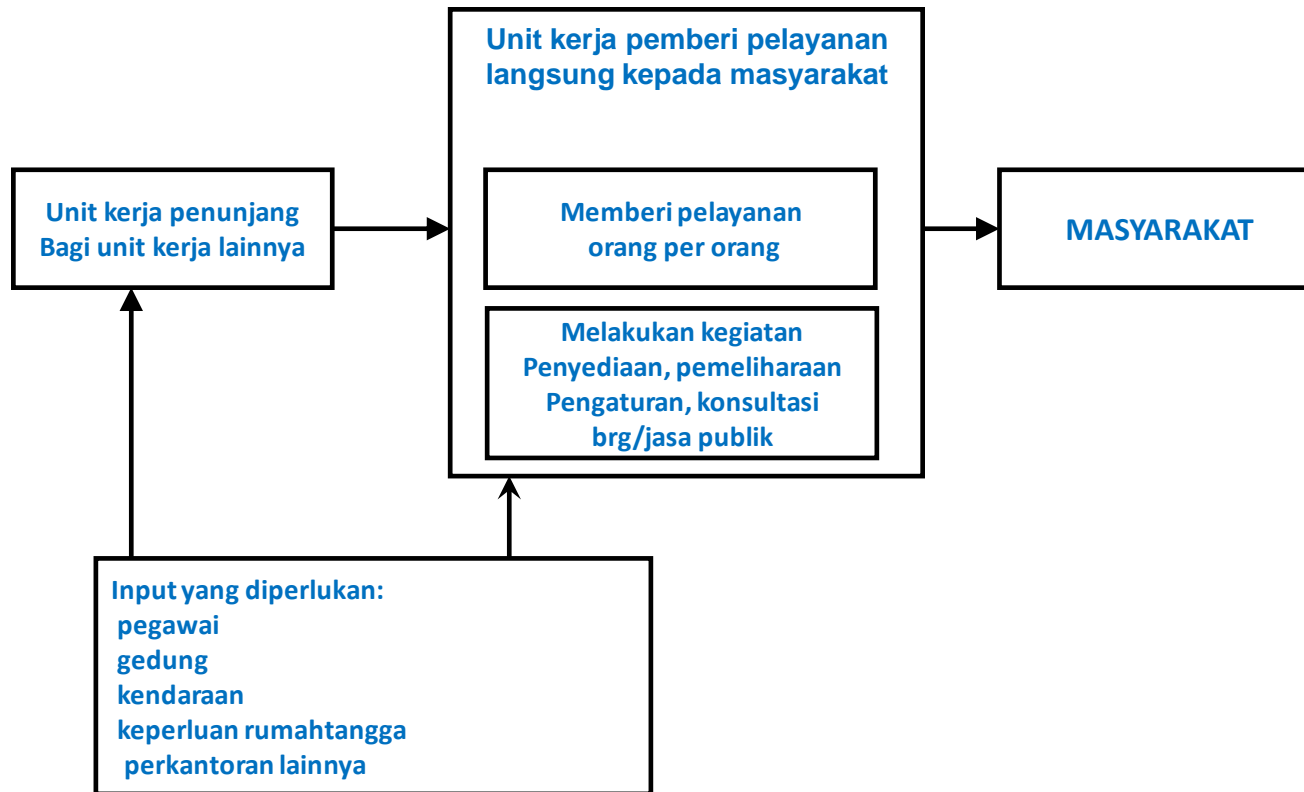
Belanja Daerah sebagai komponen anggaran adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemda untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam satu tahun tertentu. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya, keberadaan pengeluaran ini tidak berdiri sendiri, melainkan bersamaan dengan adanya penerimaan atau pendapatan. Proses perencanaan, pelaksanaan dan kemudian pengawasan terhadap pendapatan dan belanja ini tidak lain merupakan kegiatan penganggaran di lingkungan Pemda. Oleh karena itu hasil dari proses perencanaan yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan di daerah disebut sebagai anggaran Pemda yang dalam konteks administrasi pemerintahan di Indonesia lazim disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fungsi APBD

Karena diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat, maka APBD yang disusun harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Secara konseptual, Musgrave*) (1989) menyebutkan bahwa sebuah anggaran pemerintah harus memenuhi fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

*) Richard A. Musgrave & Peggi Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, New York, McGraw Hill, 5th edition, 1989.

Pengelompokan Institusi Daerah dalam Melayani Masyarakat



Variabel Penentu Alokasi Anggaran

Faktor yang dipertimbangkan	Variabel yang dipakai	Sumber data
Input yang harus ada	1. Jumlah pegawai 2. Nilai aset SKPD	- Tupoksi - Data historis
Jumlah pelayanan kepada masyarakat (Fungsi Sosial)	3. Jumlah pelayanan 4. Sumbangan PAD	- Tupoksi - Data historis pelayanan
Rentang Manajerial	5. Rentang manajerial	- Tupoksi - Data historis
Pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat	6. Keterkaitan ke depan 7. Keterkaitan ke belakang 8. Pengganda Tenaga Kerja 9. Pengganda Pendapatan	- Model input output - Tupoksi

Koefisien Alokasi Anggaran

$$I_{total} = \sum Ie_i * be_i + \sum In_i * bn_i$$

dimana:

I_{total} = Indeks total (koefisien alokasi anggaran)

Ie_i = Indeks Variabel ekonomi ke-i

be_i = bobot variable ekonomi ke-i

In_i = Indeks Variabel non ekonomi ke-i

bn_i = bobot variable non ekonomi ke-i.

Kesimpulan

- ➔ Berdasarkan hasil penghitungan indeks koefisien alokasi anggaran, SKPD yang paling besar memperoleh porsi paling besar dari penghitungan adalah Dinas Pendidikan, yaitu sebesar 17,35% dari APBD. Dinas Pendidikan bertanggungjawab pada pelayanan umum dibidang pendidikan dan pengembangan Sumberdaya Manusia. Berikutnya adalah Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 12,08 %, karena potensi ekonomi dan kemampuan sektor tersebut mendorong perekonomian dan pendapatan masyarakat. Selanjutnya Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Dinas Pekerjaan Umum (masing-masing sebesar 12,02 %, 11,00 % dan 10,79 %). Sementara, SKPD-SKPD lainnya mempunyai bagian yang relatif kecil.
- ➔ Dengan membandingkan simulasi penghitungan berdasarkan indikator (koefisien alokasi anggaran) dan realisasi anggaran tahun 2011 diperoleh perbedaan yang cukup mencolok, yaitu ada 15 SKPD dari 52 SKPD (sekitar 28,85%), 8 SKPD diantaranya Biro di Sekretariat Daerah, dengan selisih lebih dari 100%.

Rekomendasi Kebijakan

- ➔ Perumusan kebijakan alokasi anggaran dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah (Bupati Selayar) berdasarkan metode alokasi anggaran yang dibuat dengan berdasarkan koefisien alokasi anggaran ini dapat berlaku secara efektif.
- ➔ Perumusan kebijakan alokasi anggaran pembangunan untuk sektor aparatur pemerintah dan pengawasan perlu didasarkan pada analisis kebutuhan fungsional secara transparan.
- ➔ Perumusan kebijakan alokasi anggaran pembangunan perlu diperkuat oleh tim analisis kebijakan keuangan daerah, yang terdiri atas unsur konsultan keuangan dan konsultan ekonomi pembangunan dari berbagai perguruan tinggi.
- ➔ Perlu dilakukan survei terhadap potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Selayar dengan melibatkan tenaga-tenaga profesional dari berbagai perguruan tinggi, dan hasilnya disosialisasikan ke seluruh pihak yang berkepentingan.

Thanks For Listening